

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH
KELURAHAN PUDAKPAYUNG, KECAMATAN BANYUMANIK,
KOTA SEMARANG**

Oleh :

Dian Prayoga Nugraha, R. Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Wilayah Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang beserta faktor-faktor penentu keberhasilan yang mempengaruhinya. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edawrds III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Wilayah Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang masih kurang optimal. Indikator yang dirasa masih kurang diantaranya adalah upaya kebijakan yang belum tepat sasaran, penerimaan beras masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, ketersediaan sumber daya yang masih kurang, sasaran penerima yang tidak tepat sasaran. Saran yang diberikan adalah Perlu nya diadakan pendataan ulang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi, Perlu di adakanya komunikasi yang mendalam di tiap lini, penyuluhan tentang program beras miskin, Memperbaiki kualitas beras yang dibagikan pemerintah, Perlu di perbaiki dalam pemberian fasilitas yang telah disediakan, Perlu ditambahkan nya personil dalam membantu penyaluran beras miskin.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, penyaluran beras miskin

ABSTRACT

This research uses qualitative research methods. This study will describe and analyze the implementation of the programme in the region of Poor Rice Village Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang and its determinants of success that influenced them. This policy refers to government regulation Number 68 in 2002 about food security. Data collection techniques are in use through interviews, observation and documentation of information. The theory used is public policy implementation theory of George c. Edawrds III. The results of this research show that the implementation of the programme, Poor Neighborhood in an area of Rice Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang city is still less than optimal. Indicators are considered still lacking such a policy has not been an effort on target, the acceptance of the rice community that does not correspond to the number of supposed, the availability of resources is still lacking, target recipients who are not on target. The advice given was the necessity held repeated logging to collect socio-economic data, it is necessary diadakanya a profound communication in each line, the extension of poor rice, improve the quality of the rice distributed Government, needs to be fixed in the grant of facilities that have been provided, need to be added to his personnel in helping poor rice distribution.

Keywords: implementation, policy, poor rice distribution

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan. Pembangunan yang dilakukan daerah-daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia seperti yang disampaikan di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status

gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi, apabila gizi kurang dan gizi buruk terus terjadi dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Ketahanan pangan dan gizi menghendaki pasokan dan harga pangan yang stabil, merata dan berkelanjutan, serta kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, serta mengelolanya dengan baik agar setiap anggotanya memperoleh gizi yang cukup dari hari ke hari.

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Efektivitas program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga

terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin.

Pelaksanaan program raskin yang dilakukan bertujuan untuk meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) terhadap kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan pokok utama yang harus dipenuhi juga memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Oleh karenanya, aktor pelaksana program raskin dari mulai tingkat daerah, kecamatan dan desa berusaha menyusun alokasi pendistribusian raskin kepada rumah tangga miskin (RTS) agar dapat tersalurkan secara

merata dan dapat tersalurkan kepada rumah tangga miskin yang sangat membutuhkan raskin, karena program ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan beras didalam kehidupan rumah tangganya.

Program Raskin diharapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima Raskin, termasuk di wilayah Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dari hasil penelitian awal, kebijakan Raskin sudah berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin sudah sesuai dengan prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Tetapi masih adanya pelaksanaannya yang belum sesuai dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Distribusi beras yang diberikan sudah tepat dengan jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan jumlah Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras

yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah warga yang menerima Raskin, sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka karena kualitas beras yang diberikan tidak sesuai karena beras yang dibagikan mempunyai kualitas dibawah harga pasar dan berasnya ada yang pecah dan berketu.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yang telah dijelaskan akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai :

“IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN PUDAKPAYUNG, KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG”

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitian menuntut pernyataan tentang masalah yang menjadi fokus perhatian penelitian. Maka permasalahan pokok yang harus diteliti yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan

Pudakpayung Kecamatan Banyumanik

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya atau menghambat Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian program beras miskin untuk keluarga miskin yaitu:

1. Menganalisis Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik
2. Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik

KERANGKA TEORI

- 4.1.1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi adalah rangkaian kerjasama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas tinggi. Dipandang sebagai ukuran ada atau tidaknya kerja sama itu adalah akibat yang ditimbulkan yang tidak akan ada jika kerja sama itu sendiri tidak ada. Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dan kebijakan publik. Menurut Dwight waldo (dalam Inu Kencana,1997:26) administrasi publik adalah manajemen dari organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan serangkaian kegiatan diantara lembaga negara yang meliputi legislatif, esekutif, dan yudikatif yang berkaitan erat satu dengan yang lain. Administrasi publik juga merupakan suatu kajian

ilmu yang berkaitan dengan organisasi, manajemen dan kebijakan

4.1.2. Paradigma Administrasi Publik menurut Nicholas Henry

1. *Old Public Administrasion*

Administrasi publik dilihat sebagai seperangkat institusi Negara, prosedur, sistem dan struktur organisasi serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan publik untuk melayani kepentingan publik.

2. *New Public Management*

NPM berusaha memperbaiki kinerja di sektor publik dengan menggunakan metode yang baisesa digunakan oleh sektor privat. Namun NPM telah menimbulkan tantangan dalam penyediaan pelayan publik, terikat dengan legitimasi pelayanan publik, etika dalam pelayan publik dan motivasi pelayan publik.

3. *New Governance*

Paradigma *new governance* merupakan upaya menuju good governance memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Akuntabel
- Transparan
- Responsif

4. *New Public Service (NPS)*

NPS merupakan kombinasi New Public Management dan New Governance.

Berdasarkan paradigma tersebut maka Program RASKIN sebagai kebijakan pemerintah termasuk dalam program New Public Service. Hal ini dikarenakan melalui program RASKIN, diharapkan masyarakat terutama masyarakat miskin memiliki akses untuk mendapatkan RASKIN yang lebih baik dan layak dari pemerintah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

4.1. Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan publik digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. James Anderson (dalam Riant Nugroho, 2006:23) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya sebagai berikut : serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh

seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Definisi Dye (dalam Pandji Santosa, 2008:27) juga mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah dikerjakan atau tidak dikerjakan melalui definisi ini mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya yang harus dikerjakan pemerintah.

kebijakan publik berdasarkan uraian diatas merupakan serangkaian aktivitas pemerintah yang diambil untuk mengatasi masalah publik dimana kebijakan tersebut diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi.

4.2. Implementasi kebijakan Publik

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dilaksanakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan. Suatu kebijakan melalui suatu tahapan implementasi kebijakan publik setelah di formulasikan oleh pemerintah implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah

tahapan pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dengan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya,

Van Meter dan Van Horn (Samudra,1994:15) menyatakan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan, sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas termasuk tujuan jangka pendek menengah maupun panjang.

Metode penelitian

Studi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka dan jika terdapat angka-angka sifatnya hanya menunjang. Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu dan mendalami gejala-gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagai mana yang disajikan oleh situasinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. subjek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan kasus yang diteliti, akan apa yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau dengan kata lain dapat disebut dengan Informan.

Dalam penelitian implementasi program beras miskin di kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik. Karena menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksud informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian mengenai studi kualitatif tentang Implementasi Penyaluran Beras Miskin di Kelurahan Pudukpayung. Penulis disini akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara berdasarkan *interview guide* yang telah dibuat kemudian dilakukan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan dasar tujuan pada penelitian yaitu untuk melakukan Implementasi Penyaluran Beras Miskin di Kelurahan Pudukpayung.

A. Implementasi Program Beras Miskin

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasinya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan seolah olah tahapan ini kurang

berpengaruh. Pendekatan dalam implementasi Program Raskin menggunakan pendekatan *Top Down* yang sangat umum.

Implementasi kebijakan terdapat beberapa fenomena-fenomena implementasi kebijakan yang dapat di gunakan oleh penulis yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan memuat upaya-upaya yang dapat memecahkan masalah. Permasalahan-permasalahan sosial yang makin marak terjadi membuat pemerintah melakukan upaya-upaya yang dinilai dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam rangka Implementasi penyaluran beras miskin yang ditujukan untuk warga yang kekurangan atau warga yang miskin yang kurang dalam tercukupinya gizi terdapat beberapa upaya yang dilakukan.

dapat diketahui pembagian beras miskin belum tepat sasaran dikarenakan masih ada penyaluran yang belum tepat sasaran sesuai dengan rts yang ada di tiap-tiap masing kelurahan tetapi beras miskin sangat membantu terutama bagi

golongan masyarakat miskin karna dengan adanya beras miskin dapat mengurangi beban biaya konsumsi terutama untuk membeli beras.

Kebijakan yang telah dibuat bermuatan dengan hal-hal untuk memecahkan masalah yang ada. Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila pengimplementasiannya isi dan kebijakan sudah jelas sesuai tujuan yang diharapkan, pencapaian standarisasi sudah ada dan tepat. Kebijakan dapat dikatakan tepat apabila ketentuan yang ada didalamnya sudah dirumuskan sesuai karakter permasalahan sehingga mampu memecahkan masalah yang ada dan mampu membantu mengatasi masalah yang ada.

Dinas yang ditunjuk belum melaksanakan program sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan dirumuskan sesuai dengan karakter masalah sesuai dengan pedoman yang telah direncanakan adanya keterlambatan dalam penyaluran yang dilakukan oleh dinas terkait membuat penyaluran beras yang akan diberikan kepada warga miskin di Kelurahan

Pudakpayung mengalami sedikit keterlambatan

Berdasarkan hasil diatas ketepatan kebijakan, dapat diketahui bahwa Tim Pelaksana Raskin Kota Semarang melaksanakan Implementasi Kebijakan Program Raskin dengan tujuan meringankan beban pangan masyarakat miskin. Program raskin dinilai sudah tepat dengan tujuan program pemerintah dan warga merasa terbantu dengan adanya Program Raskin dan dinas yang ditunjuk melaksanakan program sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, tetapi ada sedikit hambatan dalam pendistribusian yaitu keterlambatan penyaluran beras miskin dari dinas yang terkait mengakibatkan warga miskin menunggu beras yang diberikan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksana dapat dilihat dari ketepatan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implemenasi bukan hanya pemerintah, melainkan terdapat lembaga lain yang menjadi pelaksana, yaitu pemerintah kerjasama antar pemerintah, masyarakat/ swasta, dan kebijakan

yang diswastakan.(Riant Nugroho, 2014 : 686).

Aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi, Aktor yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Program Raskin di Kelurahan Pudukpayung dan tepat atau tidaknya aktor-aktor tersebut sebagai pelaksana. Dalam kebijakan ini aktor pelaksananya bukan hanya pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat itu sendiri terutama warga di sekitar Kelurahan Pudukpayung untuk membantu melancarkan program yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk ikut andil dalam mensukseskan Pelaksanaan Raskin Kota Semarang.

Aktor-aktor tersebut memang dirasa sudah tepat dalam menjadi pelaksana utama kebijakan. Dapat diketahui Pelaksanaan Program Raskin sudah dibentuk dalam tim disetiap tingkatannya, dan sudah ada yang mengatur dari tingkatannya paling tinggi pihak kelurahan hanya memproses apa yang disampaikan dari pihak pemerintah tetapi dalam penyalurannya masih dibantu oleh koordinator dari RW Kelurahan Pudukpayung sehingga dapat

membantu mempercepat penyaluran beras miskin.

Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan program beras miskin Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mencapai tujuan yang diharapkan, setiap pelaksana ada aktor-aktor pelaksana dalam kebijakan atau program dapat berupa individu atau kelompok

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Pelaksanaan Program Raskin sudah dibentuk dalam tim disetiap tingkatannya, dan tidak adanya pihak swasta yang membantu dalam penyaluran beras miskin yang menyebabkan pihak kelurahan sendiri yang mendistribusikan sendiri penyaluran beras miskin yang dibantu koordinator RW di sekitar Kelurahan Pudukpayung sehingga mudah dalam penyaluran beras miskin ke rumah tangga sasaran.

Fenomena yang dilihat dari ketepatan pelaksana adalah ketepatan tugas pelaksana. Tugas diemban oleh *BULOG, BPS, DINAS SOSIAL* Kota Semarang sudah sesuai dengan fungsi lembaganya masing-masing. Dan dalam menjalankan tugasnya sudah optimal dan sesuai tugas.

BULOG bertugas sebagai pemberi beras miskin yang ditujukan untuk warga miskin yang berada di sekitar Kelurahan Pudukpayung, sedang BPS dan Dinas Sosial bertujuan untuk mendata warga miskin yang berhak mendapatkan jatah beras miskin., dan pihak kelurahan dibantu oleh koordinator RW di Kelurahan Pudukpayung untuk mendistribusikan beras miskin ke Rumah Tangga Sasaran.

3. Ketepatan Target

Setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki target atau sasaran yaitu memberikan kesejahteraan, ketepatan ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut sama efektifnya dengan kebijakan yang lain. Target kebijakan merupakan salah satu tolak ukur yang cukup penting dalam melihat keefektifan implementasi sebuah kebijakan. Dalam hal ini yang akan dilihat adalah siapa saja yang ditargetkan untuk menerima kebijakan tersebut dan bagaimana kondisi kesiapan target yang diintervensi.

Respon dan kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan program raskin

Respon yang didapat dari hasil wawancara diatas masyarakat senang terhadap kebijakan beras miskin yang diadakan oleh pemerintah karena tidak terbebani biaya beras di pasaran yang mahal yang jarang dijangkau atau dibeli, bahkan jika membeli tapi membeli dengan kualitas yang sedang. Tetapi masih adanya warga yang mampu untuk meminta jatah beras miskin yang diberikan oleh pemerintah juga termasuk tindakan yang menyimpang karena mereka termasuk orang yang berkecukupan.

Target dalam pelaksanaan suatu kebijakan program beras miskin. Ketepatan target penerima melihat apakah target sudah tepat sesuai yang direncanakan dan apakah ada pertentangan. Dalam Implementasi Program raskin di kelurahan pudukpayung target penerimanya ialah penduduk yang miskin atau berpenghasilan rendah dan yang telah tertera dalam pedoman pemerintah

4. Ketepatan Lingkungan

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah ada atiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat dan swasta. Dalam pedoman umum raskin telah dijelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan program ini dalam pedoman umum raskin agar tercapai tujuan yang telah ditentukan tim koordinasi tiap kota kecamatan maupun kelurahan. Tim koordinasi kabupaten antara lain sekretaris daerah, bappeda, lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, dinas sosial, bps, kabupaten/kota dan keanggotaan lainnya. Keanggotaan tim koordinasi raskin kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain sekretaris kecamatan, seksi kesejahteraan sosial, koordinator statistik kecamatan. Sedangkan tim koordinator kelurahan yaitu kepada desa atau lurah dibantu oleh koordinator rw, namun perlu dilihat apakah program raskin sudah

diimplementasikan oleh aktor-aktor sesuai dengan tupoksinya.

Tetapi di kelurahan pudak payung tidak dibantu oleh lembaga lain karena semua di proses dan dikerjakan secara sendiri oleh staf kelurahan dan juga dibantu oleh koordinator tiap rw di kelurahan pudakpayung karan cukup dengan koordinator rwsudah dapat membantu menyalurkan beras miskin dengan tepat sesuai dengan rumah tangga sasaran.

B. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi tidak hanya antara pihak pelaksana saja melainkan juga komunikasi kepada para penerima program sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik. Implementasi akan berjalan efektif

apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam proses pencapaian tujuan kebijakan kejelasan. Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat di ketahui bahwa telah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para tim pelaksana program raskin.

2. Sumber daya

sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik agar menjadi kebijakan yang efektif. Sumber daya bisa menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. sumber daya manusia sangat penting kaitanya dengan penyaluran beras miskin di Kelurahan Pudukpayung

3. Sikap

Sikap merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik Jika suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui atau memahami apa yang akan dilakukan tetapi juga

harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan. Komitmen ini dapat terlihat dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi target pemerintah pusat. Komitmen yang baik dari pegawai dapat membuat pengambil keputusan dalam pelaksanaan Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Pudukpayung dapat tepat sasaran dan dapat sesuai dengan tujuan dari program nya

4. Struktur Birokrasi

pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang SOP yang tersedia harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati dan para pelaksana harus mahir dan sesuai dengan tugas nya masing-masing

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi program Raskin

5.1.1.1 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam program raskin sudah efektif. Program raskin dinilai sudah tepat karena sasaran yang dituju sudah sesuai dengan pedoman umum raskin. Hal ini didasari oleh pengumpulan data yang diperoleh dari interview berbagai informan yang dilakukan oleh peneliti. Rumah tangga sasaran penerima beras miskin sudah mendapatkan beras yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi masih terdapat kendala dalam pembagian jatah raskin bukan cuma yang ada di tiap data kelurahan tetapi masyarakat yang tidak terdata juga ada yang dapat tetapi hanya sedikit yang mengalami itu serta masih ada kendala dalam memberikan beras yang tidak sesuai jadwal nya dalam penyaluran.

5.1.1.2 Ketepatan Pelaksana

Dalam Implementasi Program Beras Miskin di Kelurahan Pudukpayung, terdapat berbagai aktor yang terlibat baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Di Wilayah Kelurahan Pudukpayung aktor dalam Implementasi Penyaluran Beras Miskin di Kelurahan Pudukpayung yaitu, "BULOG, BPS, DINAS SOSIAL dan koordinator RW Kelurahan Pudukpayung. Masing-masing tim mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan keahlian yang dipunya. Tetapi perlu ditambahkan nya personil dalam membantu penyaluran beras miskin karena masih ada kekurangan personil yang dimiliki oleh pihak kelurahan.

5.1.1.3 Ketepatan Target

Menurut pedoman raskin, program raskin dinilai sudah tepat. Karena sasaran yang dituju sudah menerima beras sesuai dengan yang telah dijatah oleh pemerintah dalam penerimaan program raskin tidak terjadi kendala yang diperoleh masyarakat karena pembagian nya sudah sesuai target penerima program beras miskin menurut pedoman raskin adalah seluruh kelompok masyarakat sangat miskin tetapi masih adanya warga yang mampu untuk meminta jatah beras miskin yang diberikan oleh

pemerintah juga termasuk tindakan yang menyimpang karena mereka termasuk orang yang berkecukupan sehingga mereka seharusnya tidak berhak menerima beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah.

5.1.1.4 Ketepatan Lingkungan

Dalam pedoman umum raskin telah dijelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan program ini dalam pedoman umum raskin agar tercapai tujuan yang telah ditentukan tim koordinasi tiap kota kecamatan maupun kelurahan. Serta penyebaran informasi media masa mempunyai peran penting dalam proses implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai media promosi dan sosialisasi sebuah kebijakan. Peran media masa juga dapat menjadi acuan bagi ketepatan lingkungan. Media masa yang pada dasarnya menjalani peran sebagai lembaga yang menjalankan fungsi promotif.

5.1.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Pudakpayung

5.1.2.1 Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam program raskin berupa

sosialisasi yang dilakukan oleh para tim pelaksana program raskin. Sosialisasi yang diberikan berjalan sesuai yang telah ditentukan ke rumah tangga sasaran. Namun masih ada kendala yang dialami warga Kelurahan Pudakpayung yaitu adanya sedikit kendala dalam penyalurannya yaitu menerima informasi kurang jelas dan terkadang terlambat dalam pendistribusianya terkadang ada keterlambatan dalam pemberian beras miskin, dalam pendistribusian nya dibantu oleh koordinator dari Kelurahan Pudakpayung sehingga dalam penyaluran beras miskin.

5.1.2.2 Sumber daya

Tim pelaksana raskin seperti sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai. Begitu pula dengan fasilitas sudah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Fasilitas yang disediakan sudah memadai dan sudah sesuai dengan ketentuan berjalannya program raskin. Tetapi perlu diperbaiki lagi dalam pemberian fasilitas yang diberikan bulog kepada kelurahan agar menunjang kelancaran dalam distribusi beras

miskin sehingga lancar dan tidak ada keterlambatan dalam pendistribusiannya.

5.1.2.3 Sikap

Dalam kepuasan penerima raskin sudah puas dengan pembagiannya sudah sesuai dengan tujuan dari program nya, tetapi penerima raskin masih ada yang merasa kurang puas dengan raskin yang diterima karena masih terdapat kekurangan dengan kualitas beras yang diberikan oleh pemerintah karena beras yang diberikan kualitas nya tidak sebgus dengan beras yang ada di pasaran. Dalam penyaluran beras miskin sudah lancar dalam distribusi beras karena pihak terkait sudah tahu yang harus diperbuat karena sudah terdapat pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga melaksanakan program

5.1.2.4 Struktur Birokrasi

SOP dalam pelayanan dan pengelolaan beras miskin di Kelurahan Pudakpayung sesuai dengan prosedur pembagian tugas nya dan sesuai dengan bidang nya, sehingga dalam proses kebijakanya jelas dengan adanya dukungan dari tiap-tiap sektor tugas masing-masing.

Tetapi masih ada rangkap tugas dalam penyaluran beras miskin karena masih kurangnya anggota dalam membantu menyalurkan beras miskin. Masih adanya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan pihak kelurahan itu menyebabkan agak lamanya dalam proses distribusi itu.

5.2 Saran

5.2.1 Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Pudakpayung

1. Mengadakan pemantauan berkala mengenai pelaksanaan Program Beras Miskin di Kelurahan Pudakpayung seperti mendatangi langsung ke rumah tangga sasaran
2. Melakukan pendataan ulang guna memisahkan penduduk miskin dengan bukan miskin agar tujuan dan sasaran dari program berjalan sesuai dengan tujuan.

3. Perlu melakukan komunikasi yang baik dalam memberikan sosialisasi beras miskin yang ditunjukkan kepada rumah tangga sasaran
4. Perlu ditambahkan nya personil dalam membantu penyaluran beras miskin Karena masih ada kurang nya personil dalam penyaluran beras miskin.

5.2.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Pudukpayung

1. Perlu diadakanya komunikasi yang mendalam di tiap lini untuk mengatasi kendala dalam penyaluran beras miskin yang terkadang terlambat dalam pendistribusianya.
2. Memperbaiki kualitas beras yang dibagikan pemerintah karena kualitas yang diberikan kurang baik dari beras yang ada di pasaran.

3. Perlu ditambah personil karena masih adanya pegawai yang melakukan rangkap dalam kegiatannya pendistribusian beras miskin
4. Perlu diperbaiki dalam pemberian fasilitas yang diberikan bulog agar menunjang kelancaran dalam distribusi beras miskin sehingga tidak ada keterlambatan dalam pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA :

- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sholichin Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. Jakarta
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J.(2007). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA
- Nugroho, Riant.(2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi).Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant.(2014). Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan). Edisi Kelima, Revisi 2014. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani.(2007). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana.(2006). Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi). Jakarta : PT RINEKA CIPTA